

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Fungsi pajak berkembang lebih lanjut sebagai salah satu alat kendali bagi pemerintah atau dikenal dengan fungsi regulierend. Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak

penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutang nya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk penumpukan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga . Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan

Wajib Pajak . Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh pasal 22 (kecuali bendaharawan) . Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dapat membuktikan bahwa mereka memiliki daya saing yang tinggi dengan memperoleh 22 (dua puluh dua) penghargaan atas prestasi yang diraih selama lima tahun terakhir . Maka dari itu banyak perusahaan yang menggunakan jasa dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) karena sudah dianggap profesional dan ahli dalam jasa pelayanan kepelabuhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Laporan Tugas Akhir “ Analisis Pajak penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pelayanan Kepelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari studi lapang ini adalah untuk :

Mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pelayanan kepelabuhan pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Perak dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Data dan informasi yang diperoleh dari studi lapang yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Perusahaan (Persero)

Studi lapang ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi jasa pelayanan kepelabuhan dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

b. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil studi lapang ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan studi lapang pada bidang kajian yang sejenis.

c. Bagi Pihak-pihak Lain

Studi lapang ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan

atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka ruang lingkup masalah yang akan dikaji adalah Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pelayanan kepelabuhanan PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.

3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

Selain teknik pengumpulan data diatas penulis juga menggunakan teknik Riset Kepustakaan (Library Research), Yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari PT. Pelabuhan Indonesia III Cab. Tanjung Perak. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber pustaka yang relevan berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh tinjauan pustaka yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ini seperti penelitian terdahulu, Undang-Undang Perpajakan dan pendapat para ahli.

